



DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

# PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI





**PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA KABUPATEN/KOTA  
DALAM PELAKSANAAN INTERVENSI PENURUNAN *STUNTING*  
TERINTEGRASI**



# Daftar Isi

---

<b>KATA PENGANTAR</b>	01
<b>DAFTAR ISTILAH</b>	02
<b>1. DEFINISI PENILAIAN KINERJA</b>	04
<b>2. TUJUAN PENILAIAN KINERJA</b>	04
<b>3. RUANG LINGKUP PENILAIAN KINERJA</b>	04
<b>4. TATA CARA PELAKSANAAN</b>	05
1. PERSIAPAN TIM PROVINSI	05
2. PENGUMUMAN PELAKSANAAN	06
3. VERIFIKASI DATA KABUPATEN/KOTA	06
4. PELAKSANAAN PENILAIAN	06
5. KESEPAKATAN HASIL	07
6. PENGUMUMAN NILAI KINERJA KABUPATEN/KOTA	07
7. LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA KEPADA DITJEN BINA BANGDA	08
<b>5. TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN KINERJA</b>	08
<b>6. INDIKATOR PENILAIAN KINERJA</b>	08
<b>7. PEMBIAYAAN PELAKSANAAN</b>	18
<b>LAMPIRAN</b>	20



## KATA PENGANTAR

*Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Pencegahan *stunting* penting dilakukan sedini mungkin untuk membebaskan setiap anak Indonesia dari risiko terhambatnya perkembangan otak yang menyebabkan tingkat kecerdasan anak tidak maksimal.

Upaya pencegahan *stunting* membutuhkan keterpaduan penyelenggaraan intervensi gizi pada lokasi dan kelompok sasaran prioritas (Rumah Tangga 1000 HPK). Untuk mencapai keterpaduan/integrasi tersebut diperlukan penyesuaian perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkatan pemerintahan dan masyarakat. Untuk memberikan panduan bagi proses integrasi intervensi di tingkat Kabupaten/Kota, Bappenas telah menerbitkan Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten/Kota.



Sebagai upaya pembinaan dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam meningkatkan keterpaduan intervensi gizi dalam rangka percepatan penurunan *stunting* yang merupakan salah satu Prioritas Nasional, Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan penilaian kinerja kabupaten/kota yang hasilnya akan diumumkan secara nasional pada setiap Bulan Agustus. Penilaian kinerja tahunan ini diharapkan menjadi ajang pembelajaran dan daya saing yang dapat memotivasi pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi untuk meningkatkan kinerjanya dalam penanganan *stunting*.

Petunjuk teknis ini disusun sebagai panduan bagi Pemerintah Provinsi sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah dalam melaksanakan penilaian kinerja bagi kabupaten/kota. Indikator penilaian kinerja dalam petunjuk teknis ini disusun dengan mengacu pada Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten/Kota. Sehingga petunjuk teknis ini juga dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengevaluasi secara internal kualitas dan hasil pelaksanaan aksi integrasi/konvergensi di kabupaten/kota masing-masing.

Saya berharap melalui pelaksanaan penilaian kinerja ini, motivasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota akan semakin kuat dan tinggi untuk meningkatkan kualitas manajemen intervensi gizi guna masa depan gemilang anak-anak Indonesia.

Jakarta, Juni 2019  
a.n Menteri Dalam Negeri  
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah



Muhammad Hudori

## DAFTAR ISTILAH

---

1. <i>Stunting</i>	Kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
2. Intervensi	Layanan untuk mencegah/mengatasi faktor-faktor penyebab <i>stunting</i> . Terdiri dari intervensi gizi spesifik dan sensitive. Daftar intervensi gizi selengkapnya dapat dilihat pada Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan <i>Stunting</i> Terintegrasi.
3. Cakupan intervensi	Cakupan pelaksanaan intervensi. Umumnya dikenal dengan istilah cakupan layanan
4. Indikator cakupan intervensi	Indikator cakupan pelaksanaan intervensi. Umumnya dinyatakan dalam persentase. Contoh: cakupan ibu hamil mendapat IFA (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan, cakupan rumah tangga yang menggunakan air minum layak, cakupan rumah tangga menggunakan sanitasi yang layak, cakupan orangtua yang mengikuti kelas parenting.
5. Indikator outcome intervensi	Indikator outcome/hasil pelaksanaan intervensi. Misalnya: proporsi anemia pada ibu hamil, proporsi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), cakupan ASI eksklusif, tingkat kejadian diare, tingkat kejadian kecacangan, prevalensi gizi buruk.
6. Aksi konvergensi/integrasi	Instrumen dalam bentuk kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan konvergensi/integrasi intervensi gizi dalam penurunan <i>stunting</i> . Terdapat 8 aksi konvergensi/integrasi yang selengkapnya dapat dilihat pada Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Intervensi Penurunan <i>Stunting</i> Terintegrasi
7. Rumah Tangga 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Rumah tangga dengan ibu hamil atau dengan anak usia 0-23 bulan
8. Inspiratif	Segala hal yang bisa memberikan inspirasi, pengaruh, dorongan, semangat, kekuatan untuk melakukan atau membuat sesuatu.
9. Target lokasi intervensi	Daftar desa/kelurahan lokasi pelaksanaan intervensi

---

---

10. KPM	Merupakan singkatan dari Kader Pembangunan Manusia, yaitu kader yang berfungsi untuk membantu desa dalam memfasilitasi pelaksanaan integrasi penurunan <i>stunting</i> di tingkat desa. Kader tersebut berasal dari masyarakat sendiri seperti kader Posyandu, guru PAUD, dan kader lainnya yang terdapat di desa. Penjelasan lebih rinci tentang KPM dapat dilihat pada Pedoman Umum Kader Pembangunan Manusia
11. Sebaran <i>stunting</i> (prevalensi dan jumlah kasus) <i>stunting</i>	Data prevalensi dan jumlah kasus <i>stunting</i> yang dirinci dalam wilayah kabupaten, seperti per desa/kelurahan, per kecamatan, atau per wilayah Puskesmas.

---

# PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN INTERVENSI PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI

## 1) DEFINISI PENILAIAN KINERJA

Penilaian Kinerja Pelaksanaan Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi adalah proses penilaian kemajuan kinerja kabupaten/kota dalam melakukan upaya untuk memperbaiki konvergensi intervensi gizi (spesifik dan sensitif). Perbaikan ini dilakukan melalui pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi/integrasi dalam perencanaan, penganggaran, implementasi, pemantauan, dan evaluasi program/kegiatan. Pelaksanaan aksi integrasi ini diharapkan meningkatkan jumlah Rumah Tangga 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang dapat mengakses intervensi gizi secara lengkap (konvergen) di kabupaten/kota.

## 2) TUJUAN PENILAIAN KINERJA

Tujuan Penilaian Kinerja ini adalah untuk memberikan informasi mengenai:

1. Aspek kinerja apa saja yang sudah baik atau yang masih perlu ditingkatkan dari setiap kabupaten/kota
2. Perbandingan kinerja kabupaten/kota dalam wilayah provinsi
3. Pembelajaran antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi (peer learning) untuk meningkatkan kualitas dan hasil pelaksanaan 8 aksi konvergensi/integrasi.

## 3) RUANG LINGKUP PENILAIAN KINERJA

Hasil penilaian kinerja kabupaten/kota diumumkan setiap pertengahan bulan Agustus untuk tingkat provinsi, dan selanjutnya diumumkan secara nasional oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri pada akhir bulan Agustus. Ruang lingkup penilaian kinerja menyesuaikan dengan jadwal pelaksanaan aksi-aksi konvergensi/integrasi.

1. Pada tahun pertama, kabupaten/kota lokasi prioritas penurunan *stunting* (untuk selanjutnya disebut sebagai kabupaten/kota prioritas) akan dinilai hasil kinerjanya dalam melaksanakan 4 aksi konvergensi/integrasi yang terkait dengan perbaikan perencanaan, penganggaran, dan pemberian dukungan kepada desa (Aksi Analisis Situasi, Rencana Kegiatan, Rembuk *Stunting*, dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Peran Desa).
2. Pada tahun kedua, kabupaten/kota prioritas akan dinilai hasil kinerjanya dalam melaksanakan 4 aksi integrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi (Aksi Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM), Perbaikan Sistem Manajemen Data, Pengukuran dan Publikasi Data *Stunting*, Reviu Kinerja Tahunan) dan terhadap pelaksanaan 4 aksi pertama yang dilakukan pada tahun kedua.
3. Pada tahun ketiga dan seterusnya, penilaian mencakup hasil yang diharapkan dari pelaksanaan aksi konvergensi/integrasi yaitu meningkatnya konvergensi/integrasi intervensi gizi (baik spesifik maupun sensitif). Kinerja ini akan diukur melalui skor indeks khusus penanganan *stunting* yang dihitung secara independen oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Kinerja setiap aksi konvergensi/integrasi mengacu pada Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi. Indikator penilaian kinerja pada tahun pertama dan kedua disusun berdasarkan kinerja yang diharapkan dicapai dari setiap aksi konvergensi/integrasi tersebut. Mengingat peran setiap aksi sama pentingnya dalam memperbaiki konvergensi intervensi gizi (spesifik dan sensitif) bagi Rumah Tangga 1000 HPK, setiap indikator memiliki bobot penilaian yang sama. Penjelasan tentang indikator dan nilai capaian setiap indikator selengkapnya dapat dilihat pada bagian F Petunjuk Teknis ini.

### Ruang Lingkup Penilaian Kinerja

Tahun I	Tahun II	Tahun III dan seterusnya
Aksi 1-4 Tahun I	Aksi 5-8 Tahun I Aksi 1-4 Tahun II	Indeks Khusus Penanganan <i>Stunting</i>

**Keterangan:**

**Aksi 1** Analisis Situasi

**Aksi 2** Rencana Kegiatan

**Aksi 3** Rembuk *Stunting* Kabupaten/Kota

**Aksi 4** Peraturan Bupati/Walikota tentang Peran Desa

**Aksi 5** Pembinaan Kader Pembangunan Manusia

**Aksi 6** Perbaikan Sistem Manajemen Data

**Aksi 7** Pengukuran dan Publikasi Data *Stunting*

**Aksi 8** Reviu Kinerja Tahunan

## 4) TATA CARA PELAKSANAAN

Tata cara pelaksanaan penilaian kinerja oleh Provinsi terdiri dari beberapa tahap yaitu:

1. Persiapan Tim Provinsi
2. Pengumuman Pelaksanaan (Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan)
3. Verifikasi Data/Laporan Kabupaten/kota
4. Pelaksanaan Penilaian
5. Kesepakatan Hasil
6. Pengumuman Hasil
7. Laporan Pelaksanaan Penilaian Kinerja kepada Ditjen Bina Bangsa

Penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Persiapan Tim Provinsi:

Dalam pelaksanaan penilaian kinerja, provinsi melakukan persiapan sebagai berikut:

1. Menunjuk panelis penilai kinerja. Panelis penilaian kinerja terdiri dari:
  - Ketua dan/atau Anggota tim koordinasi. Tim Koordinasi yang dimaksud adalah tim yang mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam kegiatan prioritas nasional penurunan *stunting*, yang telah ditetapkan Gubernur.
  - Perwakilan dari akademisi, perwakilan dari LSM/Ormas/pemangku kepentingan terkait penurunan *stunting*
2. Briefing dan pelatihan proses penilaian kinerja bagi panelis.
3. Menentukan daerah yang akan dinilai dan yang akan diundang. Daerah yang diundang dalam forum ini adalah seluruh kabupaten/kota dalam provinsi tersebut. Adapun daerah

yang dinilai kinerjanya sekurang-kurangnya adalah daerah yang tercantum dalam daftar kabupaten/kota prioritas nasional. Provinsi dapat menambah kabupaten/kota yang akan dinilai kinerjanya sesuai prioritas provinsi yang bersangkutan. Penilaian kinerja sebaiknya diselenggarakan bersamaan dengan forum koordinasi tingkat provinsi.

4. Menyusun jadwal pelaksanaan dan mengirim undangan.

Lamanya persiapan ini disesuaikan dengan banyaknya kabupaten/kota yang akan diundang dan dinilai kinerjanya di setiap provinsi. Disarankan hal ini dilakukan 1 (satu) bulan atau 4 (empat) minggu sebelum kegiatan penilaian kinerja dilaksanakan.

---

## 2. Pengumuman Pelaksanaan (Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan)

---

Apabila kegiatan persiapan telah selesai, maka provinsi mengumumkan rencana pelaksanaan penilaian kinerja. Pengumuman ini dilakukan dengan mengirimkan surat pemberitahuan dan undangan kepada kabupaten/kota yang berisi:

1. Daftar kabupaten/kota yang akan dinilai dan daftar kabupaten/kota yang akan diundang;
2. Agenda/susunan acara penilaian kinerja;
3. Jadwal dan lokasi pelaksanaan penilaian kinerja;
4. Pemberitahuan bahwa data dan informasi yang digunakan untuk mendukung verifikasi sesuai data yang ada di web monitoring; dan
5. Outline paparan atau materi pameran masing-masing kabupaten/kota yang akan dinilai.
6. Pengumuman dilakukan paling lambat 2 minggu sebelum hari H pelaksanaan penilaian kinerja.

---

## 3. Verifikasi Data Kabupaten/kota

---

Provinsi melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa data penunjang tersedia di web monitoring. Provinsi dapat meminta kabupaten/kota untuk melengkapi data yang diperlukan melalui web monitoring.

---

## 4. Pelaksanaan Penilaian

---

Tahapan pelaksanaan penilaian adalah sebagai berikut:

1. Pemaparan oleh kabupaten/kota. Pemaparan dapat berbentuk presentasi/pemaparan atau dilakukan dalam bentuk pameran.
2. Verifikasi data: Provinsi melakukan verifikasi dengan membandingkan antara materi pemaparan dengan data pendukung yang tersedia dalam web monitoring.
3. Pemberian umpan balik dari kabupaten/kota lainnya (Format 01).
4. Rapat tim panelis untuk penyepakatan hasil penilaian yang meliputi:
  - Nilai kabupaten/kota untuk masing – masing indikator.
  - Peringkat kinerja kabupaten/kota berdasarkan nilai indikator.
5. Pengumuman peringkat kinerja kabupaten/kota.

---

## 5. Kesepakatan Hasil

---

Tim panelis menyepakati nilai untuk masing-masing indikator dan selanjutnya memasukkan kedalam matriks/tabel kinerja kabupaten/kota (Tabel 1).

**Tabel 1:**  
**Matriks Hasil Penilaian Kinerja Kabupaten/kota**

No	Kabupaten/kota	Nilai Indikator				Rekap Nilai				Total Skor	Urutan Peringkat*
		1	2	3	...	A	B	C	D		
1	Kab A										
2	Kota B										
3	Kab C										
Dst											

\*) urutan kelompok peringkat atas mempertimbangkan ada/tidaknya kinerja kabupaten/kota dengan nilai D

### Keterangan:

Setiap indikator memiliki bobot penilaian yang sama

Nilai A: skor 3, kode warna biru

Nilai B: skor 2, kode warna hijau

Nilai C: skor 1, kode warna kuning

Nilai D: skor 0, kode warna merah

Total skor = (jumlah A x 3) + (jumlah B x 2) + (jumlah C x 1)

Selanjutnya, berdasarkan total skor (dalam angka), panelis membuat peringkat kinerja antar kabupaten/kota jika terdapat lebih dari 1 kabupaten/kota yang dinilai dalam provinsi tersebut. Jika terdapat 2 atau lebih kabupaten/kota yang memiliki total skor nilai yang sama maka kabupaten/kota tersebut mendapat urutan peringkat yang sama.

Untuk penentuan peringkat terbaik (kelompok 'peringkat atas') di tingkat provinsi, kriteria yang digunakan meliputi:

1. Tidak memiliki nilai D. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kinerja yang dinilai gagal
2. Total skor

Hasil umpan balik dari peserta kabupaten/kota lain tidak diperhitungkan dalam penentuan peringkat kabupaten/kota. Umpan balik ini digunakan dalam pemberian penghargaan untuk kategori kabupaten/kota paling inspiratif, replikatif, dan inovatif.

---

## 6. Pengumuman Nilai Kinerja Kabupaten/Kota

---

Berdasarkan kesepakatan, tim penilai provinsi menetapkan peringkat kinerja setiap kabupaten/kota dan mengumumkan hasil penilaian kinerja tersebut kepada seluruh kabupaten/kota.

Tujuan pengumuman hasil penilaian kinerja dan pemberian peringkat tersebut adalah untuk mendorong seluruh kabupaten/kota untuk meningkatkan kinerjanya dalam menurunkan angka *stunting* di wilayah masing-masing.

Provinsi dapat memberikan penghargaan kepada kabupaten/kota yang memiliki kinerja baik sesuai dengan kemampuan provinsi, yang dapat berupa piagam penghargaan/plakat ataupun insentif keuangan.

---

## 7. Laporan Pelaksanaan Penilaian Kinerja kepada Ditjen Bina Bangda

---

Tim penilai kinerja provinsi melaporkan hasil penilaian kinerja kepada Ditjen Bina Bangda dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota oleh Provinsi melalui web monitoring.

### 5) TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN KINERJA

Tindak lanjut hasil penilaian kinerja oleh masing-masing tingkatan pemerintahan adalah:

1. Provinsi:

- Gubernur menyampaikan rapor penilaian setiap kabupaten/kota kepada bupati/walikota masing-masing.
- Rapor penilaian diberikan dalam bentuk matriks kinerja kabupaten/kota beserta rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan.
- Menyusun /memperbarui rencana pendampingan, termasuk pemantauan tindak lanjut rekomendasi oleh kabupaten/kota.
- Melaporkan hasil penilaian kinerja kepada Ditjen Bina Bangda.

2. Kabupaten/kota:

Kabupaten/kota memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. Pelaksanaan tindak lanjut ini akan dipantau secara berkala oleh provinsi.

3. Ditjen Bina Bangda:

- Melakukan verifikasi laporan pelaksanaan penilaian kinerja yang disampaikan oleh provinsi.
- Mempublikasikan hasil penilaian kinerja.
- Memberikan penghargaan kepada provinsi berdasarkan kinerja melakukan pembinaan kabupaten/kota dan kepada kabupaten/kota dengan kinerja terbaik.

### 6) INDIKATOR PENILAIAN KINERJA

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, indikator penilaian kinerja pada tahun pertama dan kedua disusun berdasarkan kinerja yang diharapkan dicapai dari setiap aksi konvergensi/integrasi. Kinerja dari setiap aksi konvergensi/integrasi ini mengacu pada Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi. Setiap indikator penilaian dilengkapi dengan nilai capaian kabupaten/kota. Nilai capaian disusun dalam kategori A (Baik), B (Cukup), C (Kurang), dan D (Tidak Memperoleh Nilai).

Indikator penilaian kinerja pada tahun ketiga menggunakan Indeks Khusus Penanganan *Stunting* (IKPS). Indeks ini dihitung oleh BPS berdasarkan data yang didapatkan melalui survei. Penjelasan lebih lengkap mengenai indeks ini akan disampaikan dalam dokumen terpisah.

Perkembangan indeks masing-masing kabupaten/kota akan dipantau pada setiap pelaksanaan penilaian kinerja meskipun baru digunakan sebagai dasar penilaian kinerja tahun ketiga.

Dalam pelaksanaan penilaian kinerja kabupaten/kota, peserta dari kabupaten/kota (baik dari kabupaten/kota yang menjadi peserta penilaian maupun yang menjadi peserta undangan) juga memberikan penilaian. Penilaian ini untuk mengetahui kabupaten/kota yang unggul pada kategori tertentu berdasarkan perspektif kabupaten/kota lainnya. Kategori ini meliputi kabupaten/kota yang strategi/program kerjanya:

1. Paling inspiratif
2. Paling replikatif
3. Paling inovatif

Kabupaten/kota yang unggul pada kategori tersebut berdasarkan hasil pemilihan/dukungan terbanyak yang disertai dengan alasan mengapa memilih (Format 01).

## 6.1 Indikator Penilaian Kinerja Tahun Pertama dan Tahun Kedua

Indikator penilaian kinerja dan nilai capaian disampaikan dalam Lampiran 1. Adapun penjelasan masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut.

**Aksi 1 Analisis Situasi**, indikator penilaian kinerja meliputi:

### a. Kabupaten/kota melakukan analisis untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi yang memerlukan prioritas penanganan.

1. Penjelasan: Dalam analisis situasi, kabupaten/kota diharapkan mampu menggunakan data/informasi dalam mengidentifikasi lokasi-lokasi yang memerlukan prioritas penanganan sehingga perencanaan dan penganggaran intervensi gizi semakin tepat sasaran.
2. Nilai capaian berdasarkan sejauh mana data/informasi digunakan dalam penentuan target lokasi intervensi. Data/informasi yang digunakan sekurang-kurangnya mencakup data/informasi sebaran prevalensi *stunting* (dan jumlah kasus) dan data cakupan intervensi.
3. Informasi/bukti untuk verifikasi kinerja ini adalah:
  - Hasil identifikasi permasalahan rendahnya konvergensi/integrasi intervensi gizi yang diunggah kabupaten/kota pada web monitoring
  - Presentasi kabupaten/kota pada saat penilaian kinerja

### b. Kabupaten/kota melakukan analisis mengenai jenis intervensi yang memerlukan prioritas penanganan.

1. Penjelasan: Dalam analisis situasi, kabupaten/kota diharapkan mampu menggunakan data/informasi dalam mengidentifikasi intervensi gizi yang memerlukan prioritas penanganan sehingga perencanaan dan penganggaran intervensi gizi semakin efektif dan efisien dalam meningkatkan cakupan dan kualitas intervensi.

2. Nilai capaian berdasarkan sejauh mana data/informasi digunakan dalam penentuan intervensi yang akan diprioritaskan penanganannya pada tahun berjalan dan/atau satu tahun berikutnya. Data/informasi yang digunakan sekurang-kurangnya mencakup data cakupan intervensi, data outcome intervensi, dan data ketersediaan program/kegiatan dari berbagai sumber pendanaan . Data outcome intervensi meliputi tingkat kejadian (jumlah kasus) anemia, BBLR, ASI Eksklusif, Diare, angka kecacingan, gizi buruk.
3. Informasi/bukti untuk verifikasi kinerja ini adalah:
  - Hasil identifikasi permasalahan rendahnya konvergensi/integrasi intervensi gizi yang diunggah kabupaten/kota pada web monitoring
  - Presentasi kabupaten/kota pada saat penilaian kinerja

**c. Kabupaten/kota melakukan analisis untuk mengidentifikasi kendala dalam manajemen layanan untuk menyasar Rumah Tangga 1000 HPK**

1. Penjelasan: Dalam analisis situasi, kabupaten/kota diharapkan mampu mengidentifikasi kendala dalam penyampaian layanan (intervensi) kepada Rumah Tangga 1000 HPK berdasarkan praktik penyelenggaraan intervensi di wilayahnya. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi, kabupaten/kota melakukan analisis sekurang-kurangnya terhadap 4 aspek berikut:
  - Proses perencanaan, penganggaran, pemantauan dan pengawasan layanan (seperti kendala dalam menjadikan Rumah Tangga 1000 HPK termasuk dalam target penerima manfaat, kendala dalam memantau apakah layanan menjangkau rumah tangga 1000 HPK, atau juga kendala dalam mensupervisi pelaksanaan layanan oleh petugas)
  - Desain pelaksanaan intervensi/pelaksanaan program (seperti kendala dalam cara pemberian/pelaksanaan layanan, jadwal pelaksanaan, dll)
  - Ketersediaan dan kualitas SDM pelaksana (seperti kendala dalam penyediaan atau distribusi petugas pada lokasi-lokasi yang memerlukan prioritas penanganan)
  - Kendala mengakses layanan dari sisi kelompok penerima manfaat (seperti kendala budaya, kendala biaya, waktu, dll)
2. Nilai capaian berdasarkan sejauh mana aspek analisis yang dilakukan. Semakin lengkap aspek analisisnya, maka akan semakin baik nilainya.
3. Informasi/bukti untuk verifikasi kinerja ini adalah:
  - Hasil identifikasi permasalahan rendahnya konvergensi/integrasi intervensi gizi yang diunggah kabupaten/kota pada web monitoring
  - Presentasi kabupaten/kota pada saat penilaian kinerja

**d. Rekomendasi yang dihasilkan**

1. Penjelasan: Mengacu pada Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi, rekomendasi hasil analisis situasi meliputi:
  - Perbaiki manajemen alokasi anggaran atau perbaiki target lokasi intervensi sesuai dengan sebaran prevalensi *stunting* dan kesenjangan

- cakupan intervensi
- Perbaiki manajemen layanan untuk memastikan layanan menjangkau Rumah Tangga 1000 HPK
  - Perbaiki koordinasi antar OPD serta antara kabupaten/kota dan desa
  - Perbaiki manajemen data *stunting* dan cakupan intervensi
2. Nilai capaian berdasarkan sejauh mana muatan rekomendasi hasil analisis situasi kabupaten/kota. Semakin lengkap muatan rekomendasi, maka akan semakin baik nilainya.
  3. Dalam memberikan penilaian, tim penilai perlu memeriksa apakah rekomendasi yang dihasilkan sesuai dengan temuan permasalahan rendahnya cakupan intervensi dan rendahnya cakupan Rumah Tangga 1000 HPK yang mengakses intervensi gizi spesifik dan sensitif secara lengkap, khususnya di wilayah-wilayah yang memerlukan perhatian khusus berdasarkan data sebaran *stunting* dan cakupan intervensi.
  4. Informasi/bukti untuk verifikasi kinerja ini adalah:
    - Hasil identifikasi permasalahan dan rekomendasi hasil analisis situasi, yang diunggah kabupaten/kota pada web monitoring
    - Presentasi kabupaten/kota pada saat penilaian kinerja

**Aksi 2 Rencana Kegiatan**, indikator penilaian kinerja meliputi:

**a. Kabupaten/kota menggunakan hasil analisis situasi dalam Rencana Kegiatan.**

1. Penjelasan: Rencana Kegiatan sekurang-kurangnya memuat:
  - Kegiatan penyesuaian alokasi anggaran atau target lokasi intervensi
  - Kegiatan perbaikan manajemen layanan untuk menjangkau Rumah Tangga 1000 HPK
  - Kegiatan perbaikan manajemen data terkait *stunting* dan cakupan intervensi
  - Kegiatan koordinasi antar program dan antara kabupaten/kota dengan kecamatan dan desa
  - Kegiatan kampanye perubahan perilaku dan komunikasi antar pribadi dalam percepatan penurunan *stunting*
2. Nilai capaian berdasarkan sejauh mana muatan Rencana Kegiatan untuk menerjemahkan rekomendasi hasil analisis situasi.
3. Dalam memberikan penilaian, tim penilai perlu memeriksa apakah rencana kegiatan cukup jelas dan operasional sehingga rekomendasi hasil analisis situasi ditindaklanjuti secara konkrit dalam tahun berjalan dan/atau tahun berikutnya.
4. Informasi/bukti untuk verifikasi kinerja ini adalah:
  - Matriks Rencana Kegiatan yang diunggah kabupaten/kota pada web monitoring
  - Presentasi kabupaten/kota pada saat penilaian kinerja

**b. Kabupaten/kota memperlihatkan kemajuan pelaksanaan rencana kegiatan dalam tahun**

**berjalan**

1. Penjelasan: Realisasi rencana kegiatan diharapkan dimulai pada tahun berjalan dan disinergikan dengan program kerja OPD pada tahun berjalan. OPD yang dimaksud adalah OPD penanggung jawab kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kegiatan. OPD penanggung jawab ini meliputi OPD pelaksana dan pendukung penyelenggaraan intervensi spesifik dan sensitif.
2. Nilai capaian berdasarkan sejauh mana OPD penanggungjawab berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan yang ditargetkan pada tahun berjalan. Nilai capaian mengukur proporsi OPD yang mengakomodasi kegiatan yang ditargetkan terlaksana pada tahun berjalan terhadap seluruh OPD yang diharapkan mengakomodasi kegiatan yang ditargetkan terlaksana pada tahun berjalan tersebut.
3. Informasi/bukti untuk verifikasi kinerja ini adalah:
  - Hasil pemetaan rencana kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan
  - Presentasi kabupaten/kota pada saat penilaian kinerja

**c. Kabupaten/kota mengintegrasikan Rencana Kegiatan ke dalam Renja OPD tahun berikutnya**

1. Penjelasan: Rencana kegiatan yang ditargetkan terlaksana pada satu tahun berikutnya diharapkan telah masuk dalam Rencana Kerja (Renja) OPD terkait (OPD yang termasuk penanggung jawab kegiatan, yaitu OPD pelaksana dan pendukung penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif).
2. Nilai capaian berdasarkan sejauh mana rencana kegiatan yang ditargetkan terlaksana pada tahun berikutnya masuk ke dalam Renja OPD. Semakin tinggi persentase kegiatan (yang ditargetkan terlaksana pada tahun berikutnya) masuk ke dalam Renja OPD, maka akan semakin baik nilainya.
3. Informasi/bukti untuk verifikasi kinerja ini adalah:
  - Hasil Pemetaan Rencana Kegiatan yang telah masuk ke dalam Renja OPD yang diunggah kabupaten/kota pada web monitoring
  - Presentasi kabupaten/kota pada saat penilaian kinerja

**Aksi 3 Rembuk *Stunting* Kabupaten/kota**, indikator penilaian kinerja meliputi:

**a. Pimpinan daerah dan stakeholders menunjukkan partisipasi aktif selama pelaksanaan**

1. Penjelasan: Sebagai forum publik untuk menggalang dan mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dan publik dalam pencegahan *stunting* di wilayahnya, termasuk tindakan yang harus dilakukan di tingkat kecamatan dan desa serta peran dari masing-masing OPD, Kabupaten/kota diharapkan mampu mengikat/menggalang partisipasi aktif pimpinan daerah dan berbagai pemangku kepentingan di wilayah kabupaten/kota selama pelaksanaan Rembuk *Stunting*.

2. Nilai capaian indikator ini bergantung pada dua hal: (1) unsur-unsur yang berpartisipasi dan (2) sejauh mana partisipasi aktif dari berbagai unsur tersebut. Semakin lengkap unsur yang berpartisipasi selama pelaksanaan, maka akan semakin baik nilainya. Nilai capaian mengukur proporsi unsur-unsur yang berpartisipasi terhadap seluruh unsur yang diharapkan berpartisipasi sesuai undangan.
3. Informasi/bukti untuk verifikasi kinerja ini adalah:
  - Notulen/Berita Acara Hasil Rembuk yang diunggah kabupaten/kota pada web monitoring
  - Presentasi kabupaten/kota pada saat penilaian kinerja

**b. Rembuk *Stunting* mampu menghasilkan kesepakatan/komitmen.**

1. Penjelasan: Mengacu pada Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi, kesepakatan/komitmen yang diharapkan tercapai melalui Rembuk *Stunting* Kabupaten/kota sekurang-kurangnya meliputi:
  - Deklarasi Pemerintah Kabupaten/kota dalam penurunan *stunting*
  - Komitmen Publik dalam penurunan *stunting*
  - Kesepakatan Rencana Kegiatan
  - Peran desa dan kecamatan untuk meningkatkan integrasi intervensi di tingkat desa
2. Nilai capaian berdasarkan sejauh mana muatan kesepakatan/komitmen hasil rembuk *stunting*. Semakin lengkap muatan kesepakatan tersebut, maka akan semakin baik nilainya.
3. Informasi/bukti untuk verifikasi kinerja ini adalah:
  - Notulen/Berita Acara Hasil Rembuk yang diunggah kabupaten/kota pada web monitoring
  - Presentasi kabupaten/kota pada saat penilaian kinerja

**c. Liputan/publikasi Rembuk *Stunting* oleh media.**

1. Penjelasan: Rembuk *Stunting* diharapkan melibatkan media dan mampu mendorong peran media dalam mempublikasikan proses dan/atau kesepakatan hasil rembuk serta dalam memperkuat dukungan publik untuk berkontribusi secara aktif dalam upaya penurunan *stunting* terintegrasi. Idealnya media yang terlibat tidak hanya media milik pemerintah, namun juga milik swasta/masyarakat.
2. Nilai capaian berdasarkan ada/tidaknya publikasi/sosialisasi proses dan/atau kesepakatan hasil rembuk *stunting* oleh media dan ada/tidaknya unsur media pada saat rembuk *stunting* kabupaten/kota
3. Informasi/bukti untuk verifikasi kinerja ini adalah:
  - Notulen/Berita Acara Hasil Rembuk yang diunggah kabupaten/kota pada web monitoring
  - Presentasi kabupaten/kota pada saat penilaian kinerja

**Aksi 4 Peraturan Bupati/Walikota tentang Peran Desa**, indikator penilaian kinerja meliputi:

**a. Kabupaten/kota menyediakan dukungan regulasi untuk mengoptimalkan peran desa**

**dan masyarakat dalam penurunan *stunting***

1. Penjelasan: dukungan regulasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi desa sehingga desa tidak ragu mengalokasikan Dana Desa ataupun APBdesa-nya untuk kegiatan terkait pencegahan *stunting*. Regulasi ini sekurang-kurangnya mengatur tentang:
  - Kewenangan desa dalam pelaksanaan intervensi gizi melalui APBDesa
  - Peran kecamatan dalam mendukung pemerintah desa
  - Dukungan untuk mobilisasi dan penyediaan insentif bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM)
  - Koordinasi Pemerintah Desa dengan OPD terkait dan fasilitator atau pendamping program
  - Peran kelembagaan masyarakat (Posyandu, PAUD, PKK, dan lainnya)
  - Dukungan untuk kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku di tingkat desa

Mobilisasi Kader dilakukan oleh desa/kelurahan melalui SK Kepala Desa/Lurah. Dalam SK disebutkan sumber pembiayaan operasional kader. Alokasi penganggaran untuk operasional kegiatan kader (contohnya: insentif, transportasi) secara umum sudah tercantum dalam APBDes dan/atau Dana Desa.

Dinas/Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) atau OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengidentifikasi potensi pembiayaan operasional KPM dalam integrasi intervensi penurunan *stunting* di desa, misalnya: APBDes/Dana Desa, Dinas PMD, Dinas Kesehatan, OPD lainnya, dan pihak swasta.

2. Nilai capaian berdasarkan sejauh mana muatan peraturan bupati/walikota tentang peran desa tersebut. Semakin lengkap muatan peraturan bupati/walikota tersebut, maka akan semakin baik nilainya.
3. Informasi/bukti untuk verifikasi kinerja ini adalah:
  - Salinan Perbup/Perwali tentang peran desa yang diunggah kabupaten/kota pada web monitoring
  - Presentasi kabupaten/kota pada saat penilaian kinerja

**b. Cakupan Desa yang mendapat Sosialisasi Perbup/Perwali tentang Peran Desa**

1. Penjelasan: Perbup/perwali yang telah disediakan dapat dikatakan berguna jika dapat diterapkan/diimplementasikan. Untuk itu, kabupaten/kota perlu mengawasi implementasi tersebut dengan sosialisasi perbup/perwali tersebut kepada seluruh desa di wilayahnya.

2. Nilai capaian berdasarkan sejauh mana cakupan desa yang mendapat sosialisasi perbup/perwali tentang peran desa tersebut. Semakin besar daya jangkau kabupaten/kota dalam mensosialisasikan perbup/perwali tersebut, maka akan semakin baik nilainya.
3. Informasi/bukti untuk verifikasi kinerja ini adalah:
  - Salinan Notulen dan Kesepakatan Tindak Lanjut Hasil Sosialisasi yang diunggah kabupaten/kota pada web monitoring
  - Presentasi kabupaten/kota pada saat penilaian kinerja

**Aksi 5 Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM)**, indikator penilaian kinerja meliputi:

**a. Cakupan desa/kelurahan yang memiliki KPM**

1. Penjelasan: Kabupaten/kota melakukan pembinaan KPM agar desa/kelurahan memiliki KPM yang berdaya. Untuk itu, kabupaten/kota perlu memastikan setiap desa/kelurahan memiliki KPM dan menyediakan pembinaan yang dibutuhkan Pemerintah Desa/Kantor Kelurahan dalam mengoptimalkan peran KPM di desa/kelurahan masing-masing.
2. Nilai capaian berdasarkan sejauh mana cakupan desa/kelurahan yang telah memiliki KPM. Semakin besar cakupan desa/kelurahan yang memiliki KPM, maka akan semakin baik nilainya.
3. Informasi/bukti untuk verifikasi kinerja ini adalah:
  - Hasil rekapitulasi SK Kepala Desa/Lurah oleh Dinas atau Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (OPD dengan nama lain), yang diunggah kabupaten/kota pada web monitoring
  - Presentasi kabupaten/kota pada saat penilaian kinerja

**b. Cakupan desa kelurahan dengan kepastian dukungan biaya operasional**

1. Penjelasan: Kabupaten/kota perlu memastikan adanya dukungan biaya operasional bagi pelaksanaan tugas KPM untuk menjamin kualitas dan keberlangsungan peran KPM dalam membantu desa/kelurahan meningkatkan pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi kepada rumah tangga 1000 HPK.
2. Nilai capaian berdasarkan sejauh mana cakupan desa/kelurahan yang telah mengalokasikan dukungan biaya operasional tugas-tugas KPM. Semakin besar cakupan desa/kelurahan yang mengalokasikan dukungan biaya operasional ini, maka akan semakin baik nilainya.
3. Informasi/bukti untuk verifikasi kinerja ini adalah:
  - Hasil rekapitulasi SK Kepala Desa/Lurah oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (OPD dengan nama lain), yang diunggah kabupaten/kota pada web monitoring
  - Presentasi kabupaten/kota pada saat penilaian kinerja

**Aksi 6 Sistem Manajemen Data**, indikator penilaian kinerja meliputi:

**a. Kabupaten/kota mampu memaparkan data yang memenuhi syarat kualitas mengenai**

**sebaran prevalensi (& jumlah kasus) *stunting*.**

1. Penjelasan: Data yang memenuhi syarat kualitas adalah data yang menunjukkan bahwa data tersebut akurat, dapat diverifikasi oleh Puskesmas dan/atau petugas kesehatan di tingkat kecamatan/desa
2. Kabupaten/kota diharapkan mampu menampilkan sebaran *stunting* berdasarkan desa/kelurahan sebagai salah satu informasi dalam penentuan target lokasi intervensi. Nilai capaian berdasarkan persentase desa/kelurahan yang dilengkapi dengan data *stunting* per desa/kelurahan
3. Informasi/bukti untuk verifikasi kinerja ini adalah:
  - Data sebaran prevalensi (& jumlah kasus) *stunting* yang diunggah kabupaten/kota pada web monitoring
  - Presentasi kabupaten/kota pada saat penilaian kinerja

**b. Kabupaten/kota mampu memaparkan data yang memenuhi syarat kualitas mengenai**

**cakupan intervensi.**

1. Penjelasan: Data yang memenuhi syarat kualitas adalah data yang menunjukkan bahwa data tersebut akurat dan dapat diverifikasi oleh OPD penanggung jawab intervensi.
2. Nilai capaian berdasarkan jumlah indikator cakupan intervensi yang memiliki data pada skala kabupaten/kota. Kabupaten/kota diharapkan memiliki data untuk seluruh indikator cakupan intervensi, terutama untuk indikator yang termasuk indikator utama. Daftar indikator cakupan intervensi dapat dilihat pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi.
3. Informasi/bukti untuk verifikasi kinerja ini adalah:
  - Data cakupan intervensi yang digunakan dalam analisis situasi, yang diunggah kabupaten/kota pada web monitoring
  - Presentasi kabupaten/kota pada saat penilaian kinerja

**c. Kabupaten/kota mampu memaparkan data yang memenuhi syarat kualitas mengenai**

**cakupan intervensi per desa**

1. Penjelasan: Data yang memenuhi syarat kualitas adalah data yang menunjukkan bahwa data tersebut akurat, dapat diverifikasi oleh OPD penanggung jawab intervensi dan/atau unit layanan di tingkat Puskesmas/kecamatan/desa
2. Kabupaten/kota diharapkan mampu menampilkan data cakupan intervensi berdasarkan desa/kelurahan sebagai salah satu informasi dalam penentuan target lokasi intervensi. Nilai capaian berdasarkan persentase desa yang dilengkapi dengan data cakupan intervensi dari seluruh indikator utama.
3. Informasi/bukti untuk verifikasi kinerja ini adalah:
  - Data cakupan intervensi per desa yang diunggah kabupaten/kota pada web monitoring
  - Presentasi kabupaten/kota pada saat penilaian kinerja

**Aksi 7 Pengukuran dan Publikasi data *Stunting***, indikator penilaian kinerja meliputi:

**a. Kabupaten/kota mampu melakukan analisis hasil pengukuran data *stunting* sesuai**

**pedoman dari Kementerian Kesehatan**

1. Penjelasan: Berdasarkan data hasil pengukuran *stunting*, kabupaten/kota diharapkan mampu menyusun analisis sesuai pedoman dari Kementerian Kesehatan. Temuan hasil analisis dapat disusun untuk tingkat desa, kecamatan, puskesmas, dan kabupaten/kota.
2. Nilai capaian berdasarkan ketersediaan hasil analisis untuk berbagai tingkatan, mulai dari desa sampai dengan kabupaten/kota.
3. Informasi/bukti untuk verifikasi kinerja ini adalah:
  - Publikasi hasil analisis data *stunting* yang diunggah kabupaten/kota pada web monitoring
  - Presentasi kabupaten/kota pada saat penilaian kinerja

**b. Kabupaten/kota mempublikasikan hasil analisis data *stunting* terkini**

1. Penjelasan: Berdasarkan hasil pengukuran *stunting*, kabupaten/kota diharapkan mempublikasikan hasil analisis data *stunting* tersebut untuk memperkuat komitmen Pemerintah Daerah dan masyarakat luas dalam gerakan bersama penurunan *stunting*.
2. Nilai capaian berdasarkan jangkauan publikasi yang dilakukan. Semakin menyeluruh jangkauan publikasi (sampai dengan tingkat desa), maka akan semakin baik nilainya.
3. Informasi/bukti untuk verifikasi kinerja ini adalah:
  - Presentasi kabupaten/kota pada saat penilaian kinerja
  - Contoh publikasi untuk masing-masing tingkatan

**Aksi 8 Reviu Kinerja Tahunan**, indikator penilaian kinerja meliputi:

**a. Kabupaten/kota mampu menarik pembelajaran dari pelaksanaan program/kegiatan**

**dalam satu tahun terakhir berdasarkan data/informasi**

1. Penjelasan: Reviu kinerja tahunan, sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan, diharapkan mampu memberikan rekomendasi bagi pengambilan keputusan/kebijakan periode berikutnya berdasarkan data/informasi yang lengkap, terkini, dan akurat. Untuk itu, reviu kinerja tahunan diharapkan sekurang-kurangnya menggunakan data/informasi berikut:
  - Realisasi rencana kegiatan penurunan *stunting* tahunan daerah
  - Pelaksanaan anggaran program dan kegiatan intervensi *stunting*
  - Cakupan intervensi yang diprioritaskan ditangani pada satu tahun terakhir (sesuai hasil analisis situasi)

- Penilaian mana program yang efektif dan tidak efektif disertai rekomendasi perbaikan di masa depan
  - Pelaksanaan 8 Aksi Integrasi/Konvergensi
2. Nilai capaian berdasarkan sejauh mana revidu menggunakan data/informasi. Semakin lengkap data/informasi yang digunakan, maka akan semakin baik nilainya.
  3. Informasi/bukti untuk verifikasi kinerja ini adalah:
    - Kesimpulan dan rekomendasi hasil revidu kinerja tahunan yang diunggah kabupaten/kota pada web monitoring
    - Presentasi kabupaten/kota pada saat penilaian kinerja

**b. Kabupaten/kota menyepakati tindak lanjut atas hasil revidu kinerja**

1. Penjelasan: Hasil review kinerja tahunan diharapkan digunakan oleh kabupaten/kota dalam perbaikan perencanaan dan penganggaran intervensi gizi periode berikutnya. Untuk itu, kabupaten/kota perlu membahas hasil revidu dan menyepakati tindak lanjutnya.
2. Nilai capaian berdasarkan ada/tidaknya kesepakatan dari berbagai OPD terkait untuk menindaklanjuti hasil revidu kinerja. Jika kesepakatan dilengkapi dengan rencana tindak lanjut dari setiap OPD terkait, maka akan semakin baik nilainya.
3. Informasi/bukti untuk verifikasi kinerja ini adalah:
  - Presentasi kabupaten/kota pada saat penilaian kinerja
  - Salinan kesepakatan dan rencana tindak lanjut OPD

## 6.2 Kategori Penilaian oleh Kabupaten/kota

Penilaian oleh kabupaten/kota mencakup 3 kategori, yaitu:

1. Kabupaten/kota yang strategi/program kerjanya paling memberikan inspirasi/inspiratif; yang dimaksud dengan 'inspiratif' dalam hal ini adalah yang mampu menstimulasi gagasan untuk mengembangkan cara/kegiatan/kebijakan yang lebih kreatif/inovatif
2. Kabupaten/kota yang strategi/program kerjanya paling replikatif; yang dimaksud dengan 'replikatif' dalam hal ini adalah yang dapat direplikasi oleh kabupaten/kota lain, baik parsial maupun menyeluruh.
3. Kabupaten/kota yang strategi/program kerjanya paling inovatif; yang dimaksud dengan 'inovatif' dalam hal ini adalah yang menunjukkan cara-cara baru (belum ada sebelumnya) atau pembaharuan/modifikasi dari cara/praktik yang telah dilakukan sebelumnya.

Untuk memberikan penilaian tersebut, kabupaten/kota menggunakan format terlampir (Format 01).

## 7) Pembiayaan Pelaksanaan

Kegiatan penilaian kinerja kabupaten/kota oleh Pemerintah Provinsi dapat berupa kegiatan baru atau kegiatan yang disnergikan dengan kegiatan reguler/kegiatan yang sudah teranggarkan. Kegiatan reguler/kegiatan yang sudah teranggarkan tersebut antara lain:

1. Rapat koordinasi kabupaten/kota
2. Peningkatan kapasitas aparatur
3. Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
4. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

Pendanaan pelaksanaan penilaian kinerja bersumber dari APBD provinsi. Khusus pembiayaan perjalanan dinas kabupaten/kota dibebankan kepada APBD kabupaten/kota atau dengan dukungan provinsi.

**Format 01: Kartu Belanja Pengetahuan**  
**Nama Kabupaten/kota yang dipelajari/diobservasi**

1. **Kabupaten/kota** .....
2. **Kabupaten/kota** .....
3. **Kabupaten/kota** .....
4. **Kabupaten/kota** .....
5. **Kabupaten/kota** .....
6. **Kabupaten/Kota** .....

Nominasi kabupaten/kota paling inspiratif: Kabupaten/kota .....

Alasan memilih: .....

.....

.....

Nominasi kabupaten/kota paling replikatif: Kabupaten/kota .....

Alasan memilih: .....

.....

.....

Nominasi kabupaten/kota paling inovatif: Kabupaten/kota .....

Alasan memilih: .....

.....

.....

Pembelajaran yang akan diterapkan di kabupaten/kota Anda:

.....

.....

.....

Lampiran I.1: Indikator Penilaian dan Nilai Kinerja

No	Aksi	No	Indikator Penilaian Kinerja	Output (keluaran) dan Informasi untuk Verifikasi	Nilai			
					A	B	C	D
1	Analisis Situasi	1.1	Kab/Kota melakukan analisis untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi yang memerlukan prioritas penanganan	Rekomendasi daftar lokasi prioritas (fokus penanganan) yang dihasilkan dari analisis sebaran stunting dan cakupan intervensi	Analisis menggunakan data sebaran stunting (dan jumlah kasus) dan cakupan intervensi	Analisis hanya menggunakan data cakupan intervensi atau data prevalensi stunting (jumlah kasus)	Analisis menggunakan data/informasi yang bersifat proxi, cakupan intervensi, data prevalensi, atau jumlah kasus stunting	Analisis belum berdasarkan data/informasi
		1.2	Kab/Kota melakukan analisis mengenai jenis intervensi yang memerlukan prioritas penanganan	Rekomendasi daftar intervensi yang memerlukan prioritas penanganan yang dihasilkan dari analisis data cakupan intervensi, indikator outcome intervensi dan ketersediaan program dan kegiatan	Analisis menggunakan data cakupan intervensi, indikator outcome dari intervensi*, dan ketersediaan program/kegiatan	Analisis menggunakan data cakupan intervensi dan data ketersediaan program/kegiatan	Analisis hanya menggunakan data ketersediaan program/kegiatan	Identifikasi belum berdasarkan data/informasi tertentu
		1.3	Kab/Kota melakukan analisis untuk mengidentifikasi kendala dalam manajemen layanan untuk menyoal Rumah Tangga 1000 HPK. Analisis diharapkan mencakup 4 aspek: 1. Proses perencanaan, penganggaran, pemantauan dan pengawasan layanan 2. Desain pelaksanaan intervensi/pelaksanaan program 3. Ketersediaan dan kualitas SDM pelaksana 4. Kendala mengakses layanan dari sisi kelompok penerima manfaat	Daftar kendala yang dihadapi dalam manajemen layanan	Analisis mencakup 4 aspek yang diharapkan	Analisis mencakup 3 aspek	Analisis mencakup baru mencakup 1 atau 2 aspek	Belum melakukan analisis
		1.4	Rekomendasi yang dihasilkan minimal mencakup: 1. Perbaikan manajemen alokasi anggaran atau perbaikan target lokasi intervensi sesuai dengan sebaran prevalensi stunting dan kesenjangan cakupan intervensi 2. Perbaikan manajemen layanan untuk memastikan layanan menjangkau Rumah Tangga 1000 HPK 3. Perbaikan koordinasi antar OPD serta antara kabupaten/kota dan desa 4. Perbaikan manajemen data stunting dan cakupan intervensi	Matriks Rekomendasi	Rekomendasi mencakup 4 poin	Rekomendasi mencakup sedikitnya 2 dari 4 poin	Rekomendasi mencakup 1 dari 4 poin	Tidak ada rekomendasi kegiatan

No	Aksi	No	Indikator Penilaian Kinerja	Output (keluaran) dan Informasi untuk Verifikasi	Nilai			
					A	B	C	D
2	Rencana Kegiatan	2.1	Kab/Kota menggunakan hasil analisis situasi dalam Rencana Kegiatan yang minimal memuat: 1. Kegiatan penyesuaian alokasi anggaran atau target lokasi intervensi 2. Kegiatan perbaikan manajemen layanan untuk menjangkau Rumah Tangga 1000 HPK 3. Kegiatan perbaikan manajemen data terkait stunting dan cakupan intervensi 4. Kegiatan koordinasi antar program dan antara kabupaten/kota dengan kecamatan dan desa 5. Kegiatan kampanye perubahan perilaku dan komunikasi antar pribadi dalam percepatan penurunan stunting	Matriks Rencana Kegiatan	Substansi sekurang-kurangnya mencakup 4 poin pertama	Substansi baru mencakup 3 poin pertama	Substansi hanya mencakup 2 poin pertama	Belum menyusun Rencana Kegiatan
		2.2	Kabupaten Kota memperhatikan kemajuan pelaksanaan rencana kegiatan dalam tahun berjalan	Matriks pemantauan integrasi Rencana Kegiatan (Tabel 2.4 Juknis Aksi 2) dan Matriks Pemantauan Integrasi Anggaran Rencana Kegiatan (Tabel 2.5 Juknis Aksi 2) untuk Tahun Berjalan	Semua OPD terkait mengkomodasi kegiatan yang ditargetkan terlaksana pada tahun berjalan	Sedikitnya 75% dari semua OPD terkait mengkomodasi kegiatan yang ditargetkan terlaksana pada tahun berjalan	Kurang dari 75% OPD terkait mengkomodasi kegiatan yang ditargetkan terlaksana pada tahun berjalan	Belum ada rencana kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan
		2.3	Kab/kota mengintegrasikan Rencana Kegiatan ke dalam Renja OPD Tahun berikutnya	Matriks pemantauan integrasi Rencana Kegiatan (Tabel 2.4 Juknis Aksi 2) dan Matriks Pemantauan Integrasi Anggaran Rencana Kegiatan (Tabel 2.5 Juknis Aksi 2) untuk Tahun Rencana	Semua rencana kegiatan yang ditargetkan terlaksana pada tahun berikutnya dimuat dalam Renja OPD	Sedikitnya 75% rencana kegiatan yang ditargetkan terlaksana pada tahun berikutnya dimuat dalam Renja OPD	Kurang dari 75% kegiatan yang ditargetkan terlaksana pada tahun berikutnya dimuat dalam Renja OPD	Rencana kegiatan yang ditargetkan terlaksana pada tahun berikutnya belum masuk ke dalam Renja OPD
3	Rembuk Stunting KabKota	3.1	Pimpinan daerah dan stakeholders menunjukkan partisipasi aktif selama pelaksanaan	Notulen/Berita Acara Hasil Rembuk dan Daftar Hadir	KDH, DPRD, dan sedikitnya 90% pimpinan OPD, Camat, desa, unsur K/L, masyarakat mengikuti seluruh agenda acara	KDH, DPRD, dan sedikitnya 75% pimpinan OPD, Camat, desa, unsur K/L, masyarakat mengikuti seluruh agenda acara	Kurang dari 75% pimpinan daerah dan lintas sektor yang hadir	Belum dilaksanakan
		3.2	Rembuk Stunting mampu menghasilkan kesepakatan/komitmen yang mencakup penurunan stunting 2. komitmen Publik dalam penurunan stunting 3. kesepakatan Rencana Kegiatan 4. Peran desa dan kecamatan untuk meningkatkan integrasi intervensi di tingkat desa	Notulen/Berita Acara Hasil Rembuk dan Daftar Hadir	Komitmen mencakup seluruh poin	Komitmen mencakup 3 poin pertama	Komitmen mencakup 2 poin pertama	Belum mencapai komitmen

No	Aksi	No	Indikator Penilaian Kinerja	Output (keluaran) dan Informasi untuk Verifikasi	Nilai			
					A	B	C	D
		3.3	Publikasi/sosialisasi Rembuk Stunting oleh media	Salinan publikasi/ sosialisasi media terhadap proses dan kesepakatan hasil rembuk stunting kab/kota	Ada publikasi/ sosialisasi oleh media milik swasta dan pemerintah daerah	Ada publikasi/ sosialisasi media milik pemerintah daerah/swasta saja	Media hadir pada Rembuk namun belum ada publikasi/sosialisasi Rembuk Stunting oleh media	Media diundang tapi tidak hadir
4	Peraturan Bupati/Walikota tentang Peran Desa	4.1	Kab/Kota menyediakan dukungan regulasi untuk mengoptimalkan peran Desa dan masyarakat dalam penurunan stunting. Regulasi minimal mengatur tentang: 1. Kewenangan desa dalam pelaksanaan intervensi gizi melalui APBDDesa 2. Peran kecamatan dalam mendukung pemerintah desa 3. Dukungan untuk mobilisasi dan penyediaan insentif bagi kader pembangunan manusia 4. Koordinasi Pemerintah Desa dengan OPD terkait dan fasilitator atau pendamping program 5. Peran kelembagaan masyarakat (Posyandu, PAUD, PKK, dan lainnya) 6. Dukungan untuk kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku di tingkat desa	Salinan Peraturan Bupati/Walikota tentang peran desa	Ruang lingkup mencakup minimal 5 poin	Ruang Lingkup meliputi 4 poin	Ruang lingkup mencakup minimal 3 poin	Ruang lingkup mencakup kurang dari 3 poin
		4.2	Cakupan Desa yang mendapat Sosialisasi Perbup/Perwali tentang Peran Desa	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi/Salinan Notulen dan Kesepakatan Tindak Lanjut Hasil Sosialisasi	Menjangkau seluruh desa	Menjangkau minimal 75% desa	Menjangkau minimal 50% desa	Menjangkau kurang dari 50% desa
5	Pembinaan KPM		Desa/kelurahan memiliki KPM yang berdaya					
		5.1	Cakupan desa/kelurahan yang memiliki kader pembangunan manusia	SK Kepala Desa / Lurah tentang Penunjukan KPM	Minimal di 75% desa/kelurahan	Minimal di 50% desa/kelurahan	Minimal di 25% desa/kelurahan	Kurang dari 25% desa/kelurahan
		5.2	Cakupan desa kelurahan dengan kepastian dukungan biaya operasional	SK Kepala Desa / Lurah tentang anggaran operasional KPM	Minimal di 75% desa/kelurahan	Minimal di 50% desa/kelurahan	Minimal di 25% desa/kelurahan	Kurang dari 25% desa/kelurahan
6	Sistem Manajemen Data	6.1	Kab/Kota mampu memaparkan data yang memenuhi syarat kualitas mengenai sebaran prevalensi (& jumlah kasus) stunting.	Data sebaran pola prevalensi dan jumlah kasus stunting per desa	Data stunting per desa tersedia untuk seluruh desa	Data stunting per desa tersedia sedikitnya pada 75% desa	Data stunting per desa tersedia sedikitnya pada 50% desa	Kurang dari 50% desa dilengkapi dengan data stunting per desa
		6.2	Kab/Kota mampu memaparkan data yang memenuhi syarat kualitas mengenai cakupan intervensi	Data cakupan intervensi	Tersedia untuk seluruh indikator utama (100%) pada skala kabkota	Tersedia sedikitnya untuk 75% indikator utama pada skala kabkota	Tersedia sedikitnya untuk 50% indikator utama pada skala kabkota	Kurang dari 50% indikator utama dilengkapi dengan data cakupan intervensi pada skala kabkota

No	Aksi	No	Indikator Penilaian Kinerja	Output (keluaran) dan Informasi untuk Verifikasi	Nilai			
					A	B	C	D
7	Pengukuran dan Publikasi Data Stunting	6.3	Kab/kota mampu memaparkan data yang memenuhi syarat kualitas mengenai cakupan intervensi per desa	Data cakupan intervensi per desa dari seluruh indikator utama tersedia sedikitnya pada 90% desa	Data cakupan intervensi per desa dari seluruh indikator utama tersedia sedikitnya pada 75% desa	Data cakupan intervensi per desa dari seluruh indikator utama tersedia sedikitnya pada 50% desa	Kurang dari 50% desa dilengkapi dengan data cakupan intervensi per desa dari seluruh indikator utama	
		7.1	Kab/kota mampu melakukan analisis hasil pengukuran data stunting sesuai pedoman dari Kementerian Kesehatan	Hasil analisis tersedia untuk tingkat desa, kecamatan, dan Kab/Kota	Hasil analisis tersedia untuk tingkat kecamatan dan Kab/Kota	Hasil analisis tersedia untuk tingkat Kab/Kota	Tidak ada hasil analisis data	
		7.2	Kab/kota mempublikasikan hasil analisis data stunting terkini	Kliping/salinan publikasi hasil analisis data stunting	Publikasi tersedia sampai dengan tingkat desa	Publikasi tersedia hanya untuk tingkat kab/kota	Belum ada publikasi	
8	Review Kinerja Tahunan	8.1	Kab/kota mampu menarik pembelajaran dari pelaksanaan program/kegiatan dalam satu tahun terakhir berdasarkan data/informasi sbb: 1. Realisasi rencana kegiatan penurunan stunting tahunan daerah 2. Pelaksanaan anggaran program dan kegiatan intervensi stunting 3. Cakupan intervensi yang diprioritaskan ditangani pada satu tahun terakhir (sesuai hasil analisis situasi) 4. Penilaian mana program yang efektif dan tidak efektif disertai rekomendasi perbaikan di masa depan 5. Pelaksanaan 8 Aksi Integrasi/Konvergensi	Hasil Review Kinerja Tahunan	Review mencakup minimal 4 poin	Review mencakup 3 poin	Belum melakukan review kinerja tahunan	
		8.2	Kab/kota menyetujui tindak lanjut atas hasil review kinerja	Kesepakatan Tindak Lanjut atas hasil review kinerja	Ada kesepakatan tindak lanjut dari masing2 OPD dan rencana realisasi tindak lanjut	Ada kesepakatan tindak lanjut dari masing2 OPD namun belum dilengkapi rencana realisasi tindak lanjut	Belum ada kesepakatan tindak lanjut secara umum (belum untuk setiap OPD)	
		*) Indikator Outcome Intervensi meliputi: anemia, BBLR, ASI Eksklusif, Diare, angka kecacangan, gizi buruk						

Lampiran I.2  
**Form Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi**

Periode yang dinilai : .....  
 Provinsi : .....  
 Tim Panelis : .....

No	Aksi	No	Indikator Penilaian Kinerja	Kab/Kota .....		Kab/Kota .....		Kab/Kota .....		dst
				Nilai	Keterangan	Nilai	Keterangan	Nilai	Keterangan	
1	Analisis Situasi	1.1	Kab/Kota melakukan analisis untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi yang memerlukan prioritas penanganan							
		1.2	Kab/Kota melakukan analisis mengenai jenis intervensi yang memerlukan prioritas penanganan							
		1.3	Kab/Kota melakukan analisis untuk mengidentifikasi kendala dalam manajemen layanan untuk menasar Rumah Tangga 1000 HPK. Analisis diharapkan mencakup 4 aspek: 1. Proses perencanaan, penganggaran, pemantauan dan pengawasan layanan 2. Desain pelaksanaan 3. Ketersediaan dan kualitas SDM pelaksana 4. Kendala mengakses layanan dari sisi kelompok penerima manfaat							
	1.4	Rekomendasi yang dihasilkan minimal mencakup: 1. Perbaikan manajemen alokasi anggaran atau perbaikan target lokasi intervensi sesuai dengan sebaran prevalensi stunting dan kesenjangan cakupan intervensi 2. Perbaikan manajemen layanan untuk memastikan layanan menjangkau Rumah Tangga 1000 HPK 3. Perbaikan koordinasi antar OPD serta antara kabupaten/kota dan desa 4. Perbaikan manajemen data stunting dan cakupan intervensi								

No	Aksi	No	Indikator Penilaian Kinerja	Kab/Kota .....		Kab/Kota .....		Kab/Kota .....		dst
				Nilai	Keterangan	Nilai	Keterangan	Nilai	Keterangan	
2	Rencana Kegiatan	2.1	Kab/Kota menggunakan hasil analisis situasi dalam Rencana Kegiatan yang minimal memuat: 1. Kegiatan penyesuaian alokasi anggaran atau target lokasi intervensi 2. Kegiatan perbaikan manajemen layanan untuk menjangkau Rumah Tangga 1000 HPK 3. Kegiatan perbaikan manajemen data terkait stunting dan cakupan intervensi 4. Kegiatan koordinasi antar program dan antara kabupaten/kota dengan kecamatan dan desa 5. Kegiatan kampanye perubahan perilaku dan komunikasi antar pribadi dalam percepatan penurunan stunting							
		2.2	Kabupaten Kota memperlihatkan kemajuan pelaksanaan rencana kegiatan dalam tahun berjalan							
		2.3	Kab/kota mengintegrasikan Rencana Kegiatan ke dalam Renja OPD Tahun berikutnya							
3	Rembuk Stunting Kab/Kota	3.1	Pimpinan daerah dan stakeholders menunjukkan partisipasi aktif selama pelaksanaan							
		3.2	Rembuk Stunting mampu menghasilkan kesepakatan/komitmen yang mencakup 1. deklarasi Pemerintah Kab/Kota dalam penurunan stunting 2. komitmen Publik dalam penurunan stunting 3. kesepakatan Rencana Kegiatan 4. Peran desa dan kecamatan untuk meningkatkan integrasi intervensi di tingkat desa							
		3.3	Publikasi/sosialisasi Rembuk Stunting oleh media							

No	Aksi	No	Indikator Penilaian Kinerja	Kab/Kota .....		Kab/Kota .....		Kab/Kota .....		dst
				Nilai	Keterangan	Nilai	Keterangan	Nilai	Keterangan	
4	Peraturan Bupati/Walikota tentang Peran Desa	4.1	Kab/Kota menyediakan dukungan regulasi untuk mengoptimalkan peran Desa dan masyarakat dalam penurunan stunting. Regulasi minimal mengatur tentang: 1. Kewenangan desa dalam pelaksanaan intervensi gizi melalui APBDesa 2. Peran kecamatan dalam mendukung pemerintah desa 3. Dukungan untuk mobilisasi dan penyediaan insentif bagi kader pembangunan manusia 4. Koordinasi Pemerintah Desa dengan OPD terkait dan fasilitator atau pendamping program 5. Peran kelembagaan masyarakat (Posyandu, PAUD, PKK, dan lainnya) 6. Dukungan untuk kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku di tingkat desa							
		4.2	Cakupan Desa yang mendapat Sosialisasi Perbup/Perwali tentang Peran Desa							
5	Pembinaan KPM		Desa/kelurahan memiliki KPM yang berdaya							
		5.1	Cakupan desa/kelurahan yang memiliki kader pembangunan manusia							
6	Sistem Manajemen Data	5.2	Cakupan desa kelurahan dengan kepastian dukungan biaya operasional							
		6.1	Kab/Kota mampu memaparkan data yang memenuhi syarat kualitas mengenai sebaran prevalensi (& jumlah kasus) stunting.							
		6.2	Kab/Kota mampu memaparkan data yang memenuhi syarat kualitas mengenai cakupan intervensi							
		6.3	Kab/Kota mampu memaparkan data yang memenuhi syarat kualitas mengenai cakupan intervensi per desa							

No	Aksi	No	Indikator Penilaian Kinerja	Kab/Kota .....		Kab/Kota .....		Kab/Kota .....		dst
				Nilai	Keterangan	Nilai	Keterangan	Nilai	Keterangan	
7	Pengukuran dan Publikasi Data Stunting	7.1	Kab/kota mampu melakukan analisis hasil pengukuran data stunting sesuai pedoman dari Kementerian Kesehatan Kab/kota mempublikasikan hasil analisis data stunting terkini							
		7.2								
8	Review Kinerja Tahunan	8.1	Kab/kota mampu menarik pembelajaran dari pelaksanaan program/kegiatan dalam satu tahun terakhir berdasarkan data/informasi sbb: 1. Realisasi rencana kegiatan penurunan stunting tahunan daerah 2. Pelaksanaan anggaran program dan kegiatan intervensi stunting 3. Cakupan intervensi yang diprioritaskan ditangani pada satu tahun terakhir (sesuai hasil analisis situasi) 4. Penilaian mana program yang efektif dan tidak efektif disertai rekomendasi perbaikan di masa depan 5. Pelaksanaan 8 Aksi Integrasi/Konvergensi							
		8.2		Kab/kota menyepakati tindak lanjut atas hasil review kinerja						

Lampiran I.3  
**Peringkat Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi**  
 Periode yang dinilai  
 Provinsi : .....  
 Tim Panelis : .....  
 Ketua: .....  
 Anggota .....  
 Anggota .....  
 Anggota .....  
 Anggota .....

No	Kab/ Kota	Nilai Indikator									
		Analisis untuk identifikasi lokasi prioritas	Analisis untuk identifikasi intervensi yang memerlukan prioritas penanganannya	Analisis kendala dalam manajemen layanan	Rekomendasi Hasil Analisis Situasi	Substansi Rencana Kegiatan	Kemajuan pelaksanaan rencana kegiatan dalam tahun berjalan	Integrasi Rencana Kegiatan ke dalam Renja OPD Tahun berikutnya	Partisipasi aktif pimpinan daerah dan stakeholders dalam Rembuk Stunting	Kesepakatan/komitmen hasil Rembuk Stunting	
		1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	
1	Kab A	-									
2	Kota B										
3	Kab C										
Dst											

Lampiran I.3  
**Peringkat Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi**  
**Periode yang dinilai**  
Provinsi : .....  
Tim Panelis : .....  
Ketua: ..... Anggota .....  
Anggota ..... Anggota .....

Nilai Indikator								
Publikasi/ sosialisasi Rembuk Stunting oleh media	Substansi Regulasi tentang peran desa dalam penurunan stunting	Cakupan Desa yang mendapat Sosialisasi Perbup/Perwali tentang Peran Desa	Cakupan desa/kei yang memiliki kader pembangunan manusia	Cakupan desa/kei dengan kepastian dukungan biaya operasional	Cakupan desa/kei dengan data prevalensi (& jumlah kasus) stunting	Ketersediaan data cakupan pada 20 indikator utama	Cakupan desa dengan data 20 indikator utama	Analisis hasil pengukuran data stunting
3.3	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	6.3	7.1

Lampiran I.3  
 Peringkat Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi  
 Periode yang dinilai : .....  
 Provinsi : .....  
 Tim Panelis  
 Ketua: .....  
 Anggota ..... Anggota .....  
 Anggota ..... Anggota .....

Nilai Indikator		Rekap Nilai				Total Skor	Urutan Peringkat*
		A	B	C	D		
Publikasi hasil analisis data stunting terkini	Pembelajaran dari revidu kinerja						
	Kesepakatan tindak lanjut atas hasil review kinerja						
7.2	8.1	Skor 3	Skor 2	Skor 1	Skor 0		
	8.2						

....., ..... 20....

Tim Panelis :

1. Ketua : .....
  2. Anggota : .....
  3. Anggota : .....
- dst .....

## LAMPIRAN II

**JADWAL KERJA PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PENILAIAN KINERJA KAB/KOTA TAHUN 2019**

Tingkat	Kegiatan	PIC	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
KAB/KOTA	Aksi 1: Analisis Situasi (Pelaksanaan & pelaporan di Web Monitoring)	Bappeda												
	Aksi 2: Rencana Kegiatan (Pelaksanaan & pelaporan di Web Monitoring)	Bappeda												
	Aksi 3: Rembuk Stunting (Pelaksanaan & pelaporan di Web Monitoring)	Sekda & Bappeda												
	Aksi 4: Perbup/Perwali (Pelaksanaan & pelaporan di Web Monitoring)	BPMD												
PROV	Memantau kemajuan pelaksanaan Aksi (mis: melalui Web Monitoring)	Tim Koordinasi Prov												
	Menunjuk Tim Panelis Penilai Kinerja Kabupaten/Kota	Tim Koordinasi Prov						Minggu II						
	Mengikuti pelatihan Tim Panelis oleh Ditjen Bina Bangsa	Tim Panelis							Minggu I					
	Menentukan daerah yang dinilai dan diundang	Tim Koordinasi								Minggu III & IV				
	Menyusun jadwal pelaksanaan Penilaian Kinerja	Tim Panelis								Minggu III & IV				
	Mengirim surat pemberitahuan dan undangan kepada Kab/Kota (paling lambat minggu kedua)	Tim Panelis								Minggu III & IV				
	Memastikan ketersediaan data penunjang di Web Monitoring	Tim Panelis												
	Melakukan Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota sesuai jadwal masing-masing Provinsi	Tim Panelis												

Tingkat	Kegiatan	PIC	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
	Mengumumkan nilai Kinerja Kabupaten/Kota	Tim Panelis							Minggu IV					
	Melaporkan pelaksanaan Penilaian Kinerja kepada Ditjen Bangsa	Tim Koordinasi Prov								Minggu I				
	Menyapkan rapor Penilaian Kinerja Kab/Kota	Gubernur								Minggu I				
	Menindaklanjuti hasil Penilaian Kinerja melalui pendampingan, pemantauan dan evaluasi	Tim Koordinasi Prov												
PUSAT	Memberikan bimbingan teknis dalam rangka pelaksanaan Aksi	Ditjen Bina Bangsa												
	Menerbitkan Pedoman Penilaian Kinerja	Ditjen Bina Bangsa												
	Sosialisasi Penilaian Kinerja untuk seluruh Kab/Kota/Provinsi	Ditjen Bina Bangsa						Minggu III & IV	Minggu III					
	Pelatihan Tim Panelis Penilai Kinerja Kabupaten/Kota	Ditjen Bina Bangsa							Minggu I					
	Melakukan verifikasi terhadap laporan pelaksanaan Penilaian Kinerja Provinsi	Ditjen Bina Bangsa								Minggu I, II & III				
	Mempublikasikan hasil penilaian kinerja secara nasional	Ditjen Bina Bangsa								Minggu IV				
	Memberikan penghargaan kepada Provinsi dengan kinerja Kab/Kota baik	Ditjen Bina Bangsa												

